

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BINA KELUARGA BALITA
DI BALAI PENYULUHAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3KB) KECAMATAN BANJARHARJO
KABUPATEN BREBES**

Oleh:

¹Artika Ameliani Rezillah, ²Mukarto Siswoyo, ³Hery Nariyah
^{1,2,3}Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
e-mail: nariyahhery@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terdapat gejala-gejala permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yaitu belum optimalnya Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, kurangnya petugas Penyuluh Keluarga Berencana dan kurangnya sarana dan prasarana. Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat identifikasi masalah yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, hambatan-hambatan apa saja dalam Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dan upaya-upaya apa saja untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

Tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk menggali, menemukan dan menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

Teori yang digunakan dalam Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yaitu menggunakan teori dari George C. Edward III yang terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yaitu belum optimalnya komunikasi dalam Program Bina Keluarga Balita, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya dana dalam Program Bina Keluarga Balita di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

ABSTRACK

Research that the authors do is about the implementation of the policy of under five family development program in Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Based on observations that the authors do there are symptoms of symptoms of problems in the implementation of the policy of under five family development program in Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes that is not optimally the program of developing family of children under five in Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, the lack of family planning extension officers and the lack of facilities and infrastructure. Based on the problems there is the identification of the problems that is how the implementation of the policy of the development of children under five years in Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, barriers to any abstacles in the implementation of the policy of the program development of children under five in Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes and any effort to overcome obstacles in the implementation of the policy of the program development of children under five in Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

The purpose of research that the authors do is to find out how the implementation of the policy of the development of children under five years in Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes as well as factors of any factors that influence in the implementation of the policy of the program development of children under five in Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

Research method used is descriptive qualitative method. Research that the authors do is to explore, find and explain about the implementation of the policy of the development of children under five years in Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

The theory used in the implementation of the policy of the development program of toddlers in Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes using the theory of George C. Edward III there are four variables that determine the successful implementation of a policy of communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

The result of the research implementation of the policy of the development of children under five in Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes is not yet optimal communication in the program of developing family of children under five, lack of human resources, the lack of facilities and infrastructure and the lack of funding in the program of developing children under five in Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

Pendahuluan

Membentuk dan mengukir karakter sosok manusia Indonesia yang benar-benar berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa bukan pekerjaan yang mudah dan hanya butuh waktu sekejap mata. Upaya pembentukan karakter sejak dini merupakan suatu upaya yang tiada hentinya dan sangat rumit. Dimasa mendatang anak-anak yang cerdas, mempunyai karakter baik, kepribadian mantap, mandiri, disiplin, dan memiliki etos kerja yang tinggi sangat dibutuhkan oleh tuntunan zaman era globalisasi, karena pada era ini kita harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian anak-anak Indonesia perlu dipersiapkan untuk memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif secara global pula. Pembentukan karakter sejak dini adalah kuncinya.

Pembentukan karakter merupakan sebuah *eksplorasi* terhadap nilai-nilai *universal*, meliputi strategi-strategi praktis yang mengacu kepada tujuan dasar kehidupan, yaitu: hasrat untuk mencapai kedewasaan dengan watak dan kepribadian yang matang, hasrat untuk menjalin cinta kasih dan cinta dalam keluarga dan hasrat untuk memberikan sumbangan yang berarti

bagi masyarakat secara lebih luas. Pemenuhan ketiga hasrat tersebut merupakan kepuasan hidup dan sangat tergantung pada kehidupan yang mengacu pada nilai-nilai tertentu dan pencapaian dari karakter yang baik. Adapun ciri-ciri sumber daya manusia yang mempunyai karakter yang baik adalah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bermoral dan berbudi pekerti luhur. Oleh sebab itu maka karakter yang baik merupakan kunci dari kebahagiaan manusia, karena tidak terbelenggu oleh sifat materialistis dan mempunyai hubungan harmonis dengan keluarga dan masyarakat sekitar.

Dengan mengamati kondisi yang terjadi saat ini, dimana penghayatan dan pengalaman nilai-nilai agama, etika dan moral yang cenderung merosot sehingga muncul perilaku menyimpang seperti konflik antar agama dan sosial, perkelahian antar remaja/pelajar, perusakan lingkungan, narkoba, minuman keras dan penyimpangan seksual serta berbagai kejahatan lainnya. Untuk itu melalui pemberdayaan keluarga diharapkan dapat mewujudkan keluarga berketahanan, yaitu keluarga yang

memiliki keuletan dan ketangguhan, baik secara fisik materiil maupun psikis spiritual, guna hidup mandiri serta mampu mengembangkan diri dan anggota keluarganya untuk hidup harmonis, sejahtera lahir dan batin.

Peraturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Pasal 48 ayat 1 tentang Kebijakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan cara:

- a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak melalui BKB;

Dalam keseluruhan siklus hidup manusia, masa dibawah usia lima tahun (balita) merupakan periode yang

paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, pada lima tahun pertama kehidupan manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat. Para ahli mengatakan bahwa masa belita disebut sebagai masa emas (“golden age period”) khususnya pada usia 0-2 tahun perkembangan otak mencapai 80 %. Apabila pada masa tersebut anak balita tidak dibina secara baik, maka anak tersebut akan mengalami gangguan perkembangan baik emosi, sosial, mental, intelektual dan moral yang sangat menentukan sikap serta nilai pola perilaku seseorang dikemudian hari.

Upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan proses yang jangka panjang yang harus dimulai sejak dini bahkan sejak anak di dalam kandungan. Oleh karena itu Program Keluarga Berencana yang dilaksanakan secara terpadu dengan program sektor terkait telah berupaya agar pasangan suami isteri benar-benar merencanakan sebaik-baiknya kapan mulai mempunyai anak, berapa jumlahnya, dan jarak antara anak satu dan berikutnya, serta kapan sebaiknya tidak lagi menambah jumlah anak, program-program tersebut dapat

membantu memastikan bahwa setiap bayi akan lahir sehat dan kuat. Anak yang telah dilahirkan haruslah dibina, dirawat dengan sempurna sehingga keluarga mendapatkan jaminan bahwa anaknya akan hidup dengan baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka menjadikan keluarga untuk hidup harmonis, sejahtera lahir dan batin. Salah satu upaya pembinaan ketahanan keluarga dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para ibu dalam mengasuh dan mendidik anak balitanya sejak dini agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia indonesia berkualitas. Untuk itu peranan dari Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo berperan sebagai fungsi pelaksana dan penyuluh program BKB di Kabupaten Brebes khususnya Kabupaten Banjarharjo.

Program BKB sebagai salah satu bagian program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik kecerdasan, emosional dari sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi-fungsi keluarga. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan tersebut diharapkan orangtua mampu mendidik dan mengasuh anak balitanya sejak dini agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia indonesia berkualitas.

Selama ini pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita telah dirintis sejak tahun 1984 (BKKBN). Di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes pelaksanaan program Bina Keluarga Balita kurang berjalan seperti yang diharapkan/belum optimal. Jumlah balita di Kecamatan Banjarharjo saat ini sekitar 9416 balita. Jumlah anggota setiap satu satu kelompok BKB yaitu 20 balita di setiap jenjangnya dengan kategori umur 0-5 tahun. Kategori tersebut dibagi kedalam lima jenjang umur diantaranya 0-1 tahun, 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun, dan 4-5 tahun. Mengacu pada jumlah balita dan

jumlah RW di Kecamatan Banjarharjo yang seluruhnya berjumlah 129 maka idealnya setiap RW memiliki satu atau dua kelompok BKB. Namun saat ini kelompok BKB di Kecamatan Banjarharjo hanya berjumlah 9 kelompok yang berkembang/aktif.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam program Bina Keluarga Balita di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes diantaranya:

- Belum optimalnya Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.
- Kurangnya petugas Penyuluh Keluarga Berencana
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang program BKB.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga*

Berencana (DP3KB) Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”.

Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan *problem statement* (pernyataan masalah) sebagai berikut: “Belum optimalnya Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”

Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?
3. Upaya-upaya apa saja untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?

Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.
- 2 Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.
- 3 Untuk mengetahui upaya-upaya dalam Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

Kegunaan Penelitian

Terdapat kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini baik secara teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis:
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara dan menambah pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah pelaksanaannya

sudah dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis:
 - a. Dalam penulisan ini maka kegunaannya diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan Kabupaten Brebes dalam implementasi kebijakan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan dalam ilmu administrasi negara khususnya mengenai implementasi kebijakan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut pada kajian yang sama.

Kerangka Pemikiran

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam

bukunya (dalam Leo Agustino 2016:128) mendefinisikan

Implementasi Kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Teori yang digunakan untuk dapat menganalisis implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III. Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

- a. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino 2016:128) implementasi kebijakan adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
- b. Program Bina Keluarga Balita adalah salah satu bagian program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik kecerdasan, emosional dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi-fungsi keluarga. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan tersebut diharapkan orangtua mampu mendidik dan mengasuh anak balitanya sejak dini agar anak tersebut dapat tumbuh dan

berkembang menjadi manusia Indonesia berkualitas.

- c. DP3KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan (dari pemerintah pusat). Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur (Bupati/Walikota) melalui Sekretaris Daerah. Pada DP3KB dapat dibentuk Balai Penyuluhan/UPT (Unit Pelaksana Teknis) tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional/penunjang.

Operasional konsep yang dimaksud dalam penelitian dan mengacu pada tujuan dan kerangka konsep penelitian maka penulis menyusun definisi parameter konsep operasional dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward

III aada 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Metode Penelitian yang Digunakan

Metode Penelitian Kualitatif menurut Moleong (2016:8) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perihal persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Menentukan informan kunci dan informan pendukung dalam penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kecamatan Banjarharjo

Kabupaten Brebes yaitu menggunakan teknik pengambilan informan *Purposive Sampling*, artinya bahwa pengambilan sampel-informan sesuai yang dibutuhkan.

Informan-informan dalam penelitian ini yaitu:

a. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang menguasai tentang permasalahan Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita yaitu:

1. Koordinator Penyuluh KB di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes
2. Penyuluh Keluarga Berencana di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes
3. Kader yang membantu dalam program Bina Keluarga Balita

b. Informan Pendukung

Orang-orang diluar informan kunci yang dapat memberikan informasi lengkap atau tambahan yaitu: Masyarakat yang mengikuti program Bina Keluarga Balita

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, arsip, laporan dinas, monografi, surat kabar, internet dan sumber-sumber tertulis lain.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

- a. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk mengamati secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan para informan.
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berdasarkan laporan-laporan documenter

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2011:330) teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Melalui teknik pengujian keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara check, re-check, dan cross check terhadap data itu.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Yaitu data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dirinci secara sistematis, kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Dengan kata lain reduksi data adalah memilih dan memilih data yang telah diperoleh. Data yang telah direduksi diharapkan memberikan gambaran yang lebih tajam, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

2. Display Data

Yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian, gambar, tabel, dan sebagainya. Dalam display data ini hanya data yang relevan dengan fokus dan masalah penelitian yang disajikan.

3. Verifikasi Data

Yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data yang dikumpulkan kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan dan persamaan terhadap hal-hal yang sering muncul.

4. Penarikan Kesimpulan

Yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi dan display data serta verifikasi di atas.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Balai Penyuluhan DP3KB yang beralamat di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Penelitian yang penulis lakukan selama lima bulan. Mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2018.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga

Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia seperti Penyuluh Keluarga Berencana, kurangnya sarana dan prasarana seperti APE (Alat Permainan Edukatif) dan belum optimalnya penyuluhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yaitu:

a. Komunikasi

Kurangnya komunikasi yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat/peserta BKB sehingga banyak masyarakat/peserta BKB yang belum mengerti tentang

program BKB. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya penyuluhan yang dilakukan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya dalam program BKB kurang memadai seperti kurangnya Penyuluh Keluarga Berencana yaitu hanya ada 2 petugas penyuluh KB yang harus membina 25 desa di Kecamatan Banjarharjo karena idealnya satu orang petugas membina dua desa binaan. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam program BKB yaitu hanya ada 5 kelompok/desa yang mendapatkan APE (Alat Permainan Edukatif). Serta kurangnya dukungan dana dalam program BKB.

c. Disposisi

Disposisi/sikap dari petugas sudah cukup baik dimana petugas selalu bersikap ramah kepada masyarakat saat berada di lapangan.

d. Struktur Birokrasi

Koordinasi yang dilakukan sudah cukup baik yaitu melakukan koordinasi dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia

Dini) dan Posyandu karena BKB itu merupakan lintas sektoral yaitu semua lini masuk dalam kegiatannya atau saling berhubungan.

2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yaitu kurangnya petugas penyuluh keluarga berencana yaitu hanya ada 2 petugas untuk membina 25 desa di kecamatan banjarharjo, kurangnya kader dalam program bina keluarga balita, kurangnya sarana dan prasana dalam program bina keluarga balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes serta kurangnya dukungan dana dalam program bina keluarga balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes
3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yaitu melakukan kerjasama dengan desa

yaitu melakukan rapat koordinasi desa, menambah dan memberikan pelatihan kepada kader, melakukan koordinasi dengan instansi pendidikan dan kesehatan serta bekerjasama dengan pembantu pembina keluarga berencana desa

Saran

Berdasarkan hambatan-hambatan yang penulis temukan dalam tentang Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan petugas penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Banjarharjo sehingga satu orang petugas dapat membina dua desa binaan karena banyaknya desa di Kecamatan Banjarharjo yaitu 25 desa.
2. Perlunya tambahan sarana dan prasarana serta dukungan dana dalam program BKB di Kecamatan Banjarharjo.
3. Meningkatkan penyuluhan dengan optimal sehingga program BKB dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia
- Moleong, Lexy, J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Calpulis Graha Ilmu
- Subarsono. 2016. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Sumber lain:

- Modul Pembentukan Karakter Sejak Dini Melalui Bina Keluarga Balita.2008. BKKBN
- Panduan Bina Keluarga Percontohan (BKB, BKR, BKL). 2011. BKKBN
- Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. 2013. BKKBN